

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain dan Metode Penelitian

Metode Penelitian digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses suatu penelitian agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Mohammad Nazi (2005:54) Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2012:58) Variabel adalah “segala sesuatu yang dibentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah keuangan daerah.

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan Daerah Sumber: Abdul Halim (2008) & Anita Wulandari (2001)	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang	-Daerah mampu mandiri di bidang keuangan. Diukur dengan menggunakan Rasio Kemandirian. -Daerah efektif dan efisien dalam merealisasikan PAD yang ditargetkan PAD yang ditargetkan. Diukur dengan menggunakan Rasio Efektivitas dan Efisiensi. - Daerah lebih	Rasio

	diberikan kepada masyarakat	<p>memprioritaskan belanja rutin dibandingkan dengan belanja pembangunan. Diukur dengan menggunakan Rasio Aktivitas.</p> <p>-Daerah mampu mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diukur dengan menggunakan Rasio Pertumbuhan.</p> <p>-Daerah mampu menunjukkan kemampuan dalam penyelenggaraan desentralisasi. Diukur dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi.</p>	
--	-----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3.3 Unit Analisis

Unit Analisis dalam penelitian ini adalah data APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten tahun 2011-2013. Adapun jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten berjumlah 8 Kabupaten/Kota. Berikut adalah daftar Kabupaten/Kota Provinsi Banten:

Tabel 3.2

Daftar Kabupaten/Kota Provinsi Banten

No.	Nama Kabupaten/Kota
1	Kabupaten Lebak
2	Kabupaten Pandeglang
3	Kabupaten Serang
4	Kabupaten Tangerang
5	Kota Cilegon
6	Kota Serang

7	Kota Tangerang
8	Kota Tangerang Selatan

3.4 Jenis dan Sumber Data

Pengumpulan data terdapat berbagai cara atau alat yang digunakan, dan satu sama lain dapat saling melengkapi. Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data yang diinginkan dan untuk selanjutnya data tersebut diolah, sehingga hasilnya berguna untuk menentukan hasil penelitian.

Penelitian ini menggunakan Data Kuantitatif. Menurut Teguh (2005:18) “Data Kuantitatif adalah data statistik yang berbentuk angka baik digali secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan”. Sedangkan sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan kedua dari hasil penelitian baik berupa data kuantitatif maupun data kualitatif.

Adapun data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Data APBD Kabupaten/Kota se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011-2013, yang terdiri dari data:
 - a. Target Penerimaan PAD
2. Data Laporan Realisasi APBD Provinsi Kabupaten/Kota se Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011-2013, yang terdiri dari data:
 - a. Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman
 - b. Realisasi Penerimaan PAD
 - c. Total Belanja Daerah
 - d. Total Belanja Rutin
 - e. Total Belanja Pembangunan
 - f. TPD (Total Pendapatan)

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumentasi. Menurut Arikunto (2012:126) “Studi dokumentasi yaitu cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan,

transkrip, buku surat kabar, majalah parasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan data sekunder yaitu data laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Banten tahun 2011-2013.

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan lima indikator kinerja keuangan yaitu rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan keuangan daerah dan rasio derajat desentralisasi, peneliti menelusuri laporan keuangan pemerintah daerah yang dijadikan sampel untuk mencari besaran nilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2013:19) Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum dan minimum.

1. Mean

Menurut Meilia (2010) Mean adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data (*a set of data*). Rumus Mean adalah:

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

\bar{x} : Nilai rata-rata observasi

$\sum x$: Jumlah semua hasil observasi

n : Jumlah Observasi

2. Nilai Maksimal dan Nilai Minimal

Nilai maksimal adalah nilai tertinggi di tiap akun laporan keuangan/APBD dan Nilai minimal adalah nilai terendah di tiap akun laporan keuangan/APBD.

3. Simpangan Baku

Simpangan Baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat. Menurut Meilia (2010) Pada

perhitungan simpangan rata-rata untuk menghilangkan bilangan negatif dan nilai nol dilakukan dengan mengambil nilai mutlaknya maka pada simpangan baku hal itu dilakukan dengan cara mengkuadratkan masing-masing simpangan dari nilai datanya kemudian dibagi dengan banyaknya data dan diakarkan. Rumus Simpangan Baku:

$$S = \sqrt{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

S : simpangan baku

x_i : nilai data ke i

\bar{x} : nilai rata-rata

n : banyaknya nilai data (observasi)

3.6.2 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

3.6.2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) daerah adalah perbandingan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total bantuan daerah dan pinjaman daerah. Dengan Menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat melihat kondisi keuangan daerah dengan potensi yang dimiliki daerah itu sendiri.

$$RK = \frac{PAD}{Bantuan\ Pemerintah\ Pusat + Pinjaman} \times 100\%$$

Langkah-Langkah untuk melakukan penghitungan Tingkat Kemandirian keuangan Daerah:

1. Membuat Tabel Realisasi Penerimaan PAD,BPHPB,DAK,DAU dan total penerimaan daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011-2013
2. Membandingkan antara PAD dengan Total Penerimaan
3. Mengidentifikasi dan menganalisis Realisasi penerimaan PAD,BPHPB,DAK,DAU dan total penerimaan daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011-2013
4. Menentukan tingkat kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan kriteria sebagai berikut (Abdul Halim, 2007:169):
 - a. Apabila perbandingan biaya pemungutan terhadap realisasi antara 0%-25% maka termasuk kedalam Pola Hubungan Instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.
 - b. Apabila perbandingan biaya pemungutan terhadap realisasi antara 25%-50% maka termasuk kedalam Pola Hubungan Konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
 - c. Apabila perbandingan biaya pemungutan terhadap realisasi antara 50%-75% maka termasuk kedalam Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
 - d. Apabila perbandingan biaya pemungutan terhadap realisasi antara 75%-100% maka termasuk kedalam Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

3.6.2.2 Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah (REKD) adalah perbandingan antara target PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Rasio ini digunakan untuk melihat realisasi PAD sudah memenuhi target yang dicanangkan dari tahun sebelumnya.

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$REF = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}}$$

Langkah-Langkah untuk melakukan penghitungan Rasio efektivitas dan efisiensi:

1. Penghitungan Rasio Efektivitas: Membuat Tabel Target dan Realisasi Penerimaan PAD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011-2013
2. Membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan untuk masing-masing tahun anggaran
3. Mengidentifikasi dan menganalisis target penerimaan PAD dan realisasi penerimaan PAD untuk masing-masing tahun anggaran
4. Menentukan tingkat efektivitas dengan menggunakan kriteria sebagai berikut (Mahsun:2009):
 - a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% berarti tidak efektif
 - b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% berarti efektivitas berimbang
 - c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% berarti efektif
5. Penghitungan Rasio Efisiensi: Membuat Tabel Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011-2013
6. Membandingkan antara Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan yang telah ditetapkan masing-masing tahun anggaran.

7. Mengidentifikasi dan menganalisis Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan yang telah ditetapkan masing-masing tahun anggaran.
8. Menentukan tingkat efisiensi dengan menggunakan kriteria sebagai berikut (Abdul Halim 2007:234):
 - a. Apabila perbandingan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan adalah 100% keatas maka dikategorikan Tidak Efisien
 - b. Apabila perbandingan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan adalah 90%-100% maka dikategorikan Kurang Efisien
 - c. Apabila perbandingan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan adalah 80%-90% maka dikategorikan Cukup Efisien
 - d. Apabila perbandingan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan adalah 60%-80% maka dikategorikan Efisien
 - e. Apabila perbandingan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan adalah Kurang dari 60% maka dikategorikan Sangat Efisien

3.6.2.3 Rasio Aktivitas Keuangan Daerah

Rasio aktivitas keuangan daerah adalah perbandingan perhitungan belanja langsung dan belanja tidak langsung dengan total APBD. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja pembangunan yang digunakan cenderung semakin kecil (Mahmudi, 2011: 143).

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

Langkah-Langkah untuk melakukan penghitungan Rasio Aktivitas keuangan Daerah:

1. Membuat Tabel APBD Tahun Anggaran 2011-2013 dan total belanja rutin serta belanja pembangunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011-2013
2. Membandingkan antara Total belanja rutin dengan Total APBD Tahun Anggaran berjalan, lalu Membandingkan antara Total belanja pembangunan dengan Total APBD Tahun Anggaran berjalan
3. Mengidentifikasi dan menganalisis hasil perhitungan
4. Menentukan Rasio Aktivitas keuangan daerah dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Secara teoritis dibandingkan pengeluaran belanja rutin (belanja tidak langsung), pengeluaran belanja pembangunan (belanja langsung) mempunyai *multiplier effect* yang lebih besar dalam membentuk pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pengeluaran belanja langsung mempunyai dampak langsung bagi kehidupan masyarakat. Didalam literatur-literatur, implementasinya pengeluaran belanja langsung ini disamakan dengan investasi pemerintah yang bersifat *social investment* (Rahmiyati,2008). Sehingga dapat disimpulkan semakin besar belanja langsung maka semakin baik kinerja keuangan daerah tersebut.

3.6.2.4 Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan adalah perbandingan Pendapatan atau pengeluaran tahun berjalan dengan pendapatan atau pengeluaran tahun lalu. Data yang dibutuhkan dalam rasio ini adalah PAD, TPD, Belanja pembangunan dan belanja Rutin.

$$R = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n : Data tahun ke-n

P₀ : Data tahun ke-0

R : Pertumbuhan

Langkah-Langkah untuk melakukan penghitungan Rasio pertumbuhan:

1. Membuat Tabel Perhitungan PAD, TPD, Belanja rutin dan Belanja pembangunan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011-2013
2. Membandingkan hasil perhitungan tiap Data tahun ke-n dengan Data Tahun ke-0
3. Mengidentifikasi dan menganalisis hasil perhitungan
4. Menentukan rasio pertumbuhan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Semakin tinggi nilai PAD, TPD dan Belanja pembangunan yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Rutin, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode yang berikutnya. Selanjutnya jika semakin tinggi nilai PAD, TPD, dan Belanja Rutin yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja pembangunan, maka pertumbuhannya adalah negatif (Widodo, 2001 : 270).

3.6.2.5 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin

tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggara desentralisasi (Mahmudi 2011:169).

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPD_t} \times 100\%$$

Langkah-Langkah untuk melakukan penghitungan Rasio derajat desentralisasi:

1. Membuat Tabel Total PAD dan Total Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011-2013
2. Membandingkan antara Total PAD dengan Total Pendapatan Daerah
3. Mengidentifikasi dan menganalisis hasil perhitungan
4. Menentukan tingkat efektivitas dengan menggunakan kriteria sebagai berikut (Anita Wulandari, 2001:22):
 - a. Jika diperoleh nilai antara 00,00-10,00 berarti sangat kurang
 - b. Jika diperoleh nilai antara 10,01-20,00 berarti kurang
 - c. Jika diperoleh nilai antara 20,01-30,00 berarti cukup
 - d. Jika diperoleh nilai antara 30,01-40,00 berarti sedang
 - e. Jika diperoleh nilai antara 40,01-50,00 berarti baik
 - f. Jika diperoleh nilai lebih dari 50,00 berarti sangat baik